

ABSTRAK

FAUZI DEFRIAL, 07193032, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang, Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pembimbing I: Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA, Pembimbing II: Andri Rusta S.IP, M.PP.

Penertiban Pedagang Kaki Lima disekitar kawasan Bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang merupakan tindakan lanjutan dari Pemerintah Kota Padang dalam rangka mengimplementasikan isi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Akan tetapi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa masalah sehingga membuat pengimplementasian yang dilakukan tidak berjalan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi dari implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Terdapat sebuah teori untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu: teori evaluasi versi William N. Dunn dengan jenis evaluasi proses retrospektif. Teori ini terdiri dari 6 variabel yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan etik dan emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengimplementasian pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut, karena pengimplementasiannya terkendala oleh kurangnya jumlah personel pengawas PKL dan kurangnya koordinasi diantara dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan dalam mengurus penegakan Perda disekitar kawasan Bundaran Air Mancur tersebut serta tidak adanya solusi konkrit dari Dinas-dinas terkait dalam menanggulangi PKL di sekitar kawasan Bundaran Air Mancur. Hal tersebut memberi dampak terhadap efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan ketepatan dari implementasi Peraturan Daerah tersebut. Akibatnya jumlah PKL di sekitar kawasan Bundaran Air Mancur semakin banyak dan mengganggu ketertiban umum di sekitarnya. Selain itu kegagalan implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 juga disebabkan oleh ketidakpuasan para pedagang kaki lima terhadap implementasi pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005, yang mereka nilai kurang memberikan manfaat dan solusi bagi mereka, hal ini memberi dampak terhadap responsivitas dari implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

Fauzi Defrial, 07193032, Political Science Departement, Social and Political Science Faculty - Andalas University, Implementation of Local Law of Padang Number 11 at 2005 about public orderliness and tranquility society. First Supervisor: Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA, Second Supervisor: Andri Rusta, S.IP, M.PP.

Orderliness of *pedagang kaki lima* around *Bundaran Air Mancur* area in Padang market center as sustain act from Padang City Government on: Implementation of Local Law of Padang Number 11 at 2005 about public orderliness and tranquility society. But, in act of implementation that local law had a several problem till the implementation does not running maximum. This research proposes to describe the evaluation from the implementation of chapter 8 point 1 of Local Law of Padang Number 11 at 2005 about public orderliness and tranquility society. There is a theory for evaluate from the Implementation of Local Law of Padang Number 11 at 2005 about public orderliness and tranquility society, there are: evaluation theory with retrospective process type from William N. Dunn. This theory consist 6 variables, there are effectivity, efficiency, completeness, flat, responsively and appropriately. This research use qualitative method with descriptive type and collecting data with documentation and interview technique. Analyzing data use ethic and emit. Result of this research shown that: the implementation of chapter 8 point 1 of Local Law of Padang Number 11 at 2005 about public orderliness and tranquility society does not running maximum according the Local Law propose, because the implementation was treated by less of number *pedagang kaki lima* supervisor (*Trantib* officer) and less of coordination among local government division whose authorize in manage the local law around *Bundaran Air Mancur* area and there is no concrete solution from local government division whose authorize to prevent micro merchant around *Bundaran Air Mancur* area. Those problem are giving impact to affectivity, efficiency, completeness, flat, responsively and appropriately from implementation of that Local Law. Besides that, the failed of that Local law implementation cause of unsatisfied from *pedagang kaki lima* face to implementation of chapter 8 point 1 of Local Law of Padang Number 11 at 2005 which they mark are giving less of benefit and solution for them. Thus, give effect toward responsively from implementasion of that local law.

Keyword: Evaluation, Implementation, *Pedagang Kaki Lima*.